

**VALUE FOR MONEY PADA LKJIP DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 DAN 2021**

VALUE FOR MONEY AT LKJIP GRESIK EDUCATION OFFICE IN 2020 AND 2021

Ade Irma Suryani Lating¹, Syifa Aulya Putri², Risna Prisilia Margarita³

^{1,2,3} Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

^{1,2,3}Jl. Jend. A. Yani 117

Email: ade.irma@uinsby.ac.id¹, aulyasyifa84@gmail.com², risnapm02@gmail.com³

Sejarah Artikel: Diterima September 2023, Disetujui Oktober 2023, Dipublikasikan November 2023

ABSTRAK

Sektor publik dipandang sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran modal, dan organisasi yang terus menerus rugi. Salah satu penyebab gagasan buruk semakin melekat di sebagian besar layanan publik di Indonesia adalah rendahnya profesionalisme organisasi layanan public. Kenyataan ini menyadarkan kita akan pentingnya peran petugas khususnya petugas yang langsung dalam melayani publik. Tujuan riset ini yaitu untuk menganalisis kinerja pelayanan public pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2020 dan 2021 melalui rancangan *Value for money*. Metode penelitian yang dipakai ialah Deskriptif Kuantitatif. Pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Variabel Penelitian adalah pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) periode periode 2020 dan 2021. Indikator pengukuran variabel yang diukur dengan rasio *value for money*, meliputi rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sumber data dalam penulisan ini yaitu data sekunder. Data sekunder yang dipakai pada riset ini ialah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2020-2021 yang berasal dari *web* resmi. Hasil riset ini menunjukkan bahwa analisis rasio ekonomis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2020 dan 2021 cukup ekonomis dengan kriteria nilai <100%; rasio efisiensi cukup efisien dengan kriteria nilai >100%; dan rasio efektivitas tidak efektif dengan kriteria nilai <100%.

Kata Kunci: Laporan Akuntabilitas Kinerja, Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas.

ABSTRACT

The public sector is seen as a hotbed of inefficiency, waste, a source of capital leakage, and an ever-losing organization. One of the causes of bad ideas increasingly inherent in most public services in Indonesia is the low professionalism of public service organizations. This fact makes us aware of the importance of the role of officers, especially officers who directly serve the public. The purpose of this study is to analyze the performance of public services at the Gresik Regency Education Office in 2020 and 2021 through the Value for money concept. The research method used is descriptive quantitative. Data collection includes literature and documentation studies. The variables of the study were the performance measurement of the Gresik Regency Education Office based on the government agency Performance Accountability Report (LAKjIP) for the 2020 and 2021 periods. Variable measurement indicators are measured by the ratio of value for money, including the ratio of economics, efficiency, and effectiveness. The source of data in this study is secondary data. The secondary Data used in this study is the government agency Performance Accountability Report (LAKjIP) of the Gresik Regency Education Office for the period 2020-2021 which comes from the Official web. The results of this research show that the analysis of the economic ratio at the Gresik Regency Education Office in 2020 and 2021 is quite economical with a value criterion of <100%; the efficiency ratio is quite efficient with a value criterion of >100%; and the effectiveness ratio is not effective with a value criterion of <100%.

Keywords: Performance Accountability Report, economic, efficiency, and effectiveness

PENDAHULUAN

Entitas sektor publik ialah organisasi nirlaba yang bertujuan agar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhubungan dengan penyediaan barang atau jasa serta jasa kepada publik umum seperti jasa pada aspek pendidikan, transportasi, kesehatan, jasa pelayanan publik, keamanan, ketegasan hukum, dan lain sebagainya. Entitas ini biasanya mempunyai arah tujuan yang jelas dan tidak mencari keuntungan dalam bentuk finansial. Secara umum, entitas sektor publik dapat disebut bagus jika entitas tersebut mampu mengimplementasikan fungsinya dengan menggapai tujuannya sesuai standar yang telah ditentukan dan dilakukan pada tingkat ekonomis, efisien dan efektif (Harindra, 2019).

Saat ini, entitas non laba dianggap sebagai sumber inefisiensi, pemborosan, akar kebocoran modal, dan organisasi yang terus menerus merasakan kerugian. Berbagai hal negatif yang semakin menempel kepada banyaknya pelayanan publik di Indonesia salah satunya diakibatkan oleh rendahnya profesionalisme lembaga layanan publik. Fakta ini menyadarkan kita begitu krusialnya peran petugas khususnya petugas yang secara langsung dalam melayani publik. Masih banyak utilitas yang terkesan tidak profesional lambat, dan memiliki biaya pelayanan yang tinggi, hal ini akan terus menjelma tugas pemerintah untuk bergulir ke arah lebih baik dalam rangka perubahan birokrasi di negeri ini.

Pemerintah mengenggam peran yang serius dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Eksistensi pentingnya pendidikan di Indonesia terlihat melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Setiap daerah di Indonesia memiliki Dinas Pendidikan tersendiri yang bermaksud untuk memenuhi kepentingan pada tiap wilayahnya. Begitu juga di Kabupaten Gresik yang mempunyai Dinas Pendidikan. Mengenai visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yaitu Menciptakan Gresik Baru, Lebih Mandiri, lebih Sejahtera, Berdaya Saing dan Progresif Berdasarkan Akhlakul Karimah. Tujuan ini sepadan dengan tujuan organisasi sektor public yang bukan hanya berorientasi pada *return*, tetapi juga fokus pada penyediaan pelayanan sosial public.

Tercapainya visi tersebut tentunya takkan terlepas dari banyaknya permasalahan pendidikan yang menaunginya. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2020 dan 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tergolong rendah (masih jauh dari target). Data menunjukkan bahwa APK PAUD Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebesar 75,95% dari target 89% dan APM SMP/MTS sebesar 74,77%. Namun, menurut Nasional di tahun 2020 APK mencapai 97% (dikutip berdasarkan Permendikbud No. 80 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat (2) yang memiliki makna APK/APM Kabupaten Gresik tergolong kecil karena masih dibawah standar.

Perkembangan pada bidang pendidikan, APM serta APM merupakan faktor penentu dalam mengamati tingkat mutu kegiatan pendidikan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini tentunya perhatian utama pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam menambah mutu serta pelayanan pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik harus selalu meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja diharapkan dapat menambah peran dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Hal pokok yang diperlukan ketika menyusun laporan kinerja ialah mengukur kinerja dan evaluasi kinerja juga penyajian (*disclosure*) serta analisis ukuran kinerja. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik diharuskan agar melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gresik disusun demi memberikan informasi kinerja tugas yang terukur terkait dengan kinerja yang diharapkan dapat dicapai dalam melaksanakan kegiatan yang diidentifikasi sesuai dengan kondisi pelaksanaan anggaran di Dinas Kabupaten Gresik.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LKjIP, yang menjadi landasan penilaian ukuran berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan maksud dan arah dari pencapaian visi dan misi suatu instansi pemerintah, menjadi tujuan pendayagunaan ukuran kinerja. Pengukuran kemampuan dilakukan melalui tingkat *input* dan *output*, juga hilir manfaat dan dampak yang pada akhirnya akan ditimbulkan, dan tentunya diukur secara

sistematis. Atas dasar ini, pengukuran kinerja dapat membenarkan peran pengambilan keputusan dan mengukur kinerja selama periode waktu tertentu, serta dibandingkan dengan periode lainnya.

Pengukuran kinerja merupakan prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pekerjaan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, seperti data efisiensi sumber daya dalam mewujudkan produksi barang dan jasa, kualitas barang serta jasa (sejauh mana barang maupun jasa disediakan untuk pelanggan yang puas), hasil kegiatan dibandingkan dengan tujuan yang diinginkan, dan efektivitas tindakan untuk meraih tujuan. Dengan demikian, pengukuran kinerja adalah teknik untuk memperkirakan keberhasilan suatu entitas. Dalam hal entitas nirlaba, tingkat keberhasilan suatu organisasi bisa dipakai untuk memperoleh legitimasi juga memenangkan suara masyarakat. Tentu saja penilaian tentang keberhasilan suatu entitas dalam penyelenggaraan layanan publik berkualitas, berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai subjek pelayanan.

Indikator Kinerja merupakan pengukuran kuantitatif dan kualitatif, yang menggambarkan kualitas capaian target dan arah yang sudah ditentukan. Indikator-indikator ini, dapat dijabarkan diantaranya:

- a. Indikator masukan (*inputs*) ialah semua yang diperlukan agar implementasi aktivitas dapat membuahkan hasil. Indikator tersebut bisa berupa permodalan, sumber daya manusia, data, kebijakan peraturan perundang-undangan, dan lainnya.
- b. Indikator Hasil (*outputs*) yaitu segala hal yang harus diperoleh secara langsung dari suatu program yang bersifat materil ataupun immateriil.
- c. Indikator hasil (*outcomes*) ialah semua yang menggambarkan bekerjanya fungsi kegiatan produksi dalam periode menengah (dampak langsung).
- d. Indikator manfaat (*benefits*) ialah suatu hal yang berkaitan dengan arah kegiatan yang dilakukan.
- e. Indikator dampak (*impacts*) merupakan dampak yang terjadi berupa hal positif ataupun negatif pada setiap tingkat indikator berdasarkan gagasan yang telah ditentukan.

Value for money menjadi hal pokok dalam mengukur kemampuan pada entitas non laba lantaran kemampuan pemerintah tak dapat dinilai hanya berdasarkan *output* yang diperoleh

saja, melainkan secara terpadu wajib mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersamaan (Purwiyanti, 2017). *Value for money* yaitu rancangan manajemen entitas sektor publik yang didasarkan melalui tiga faktor pokok, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi melibatkan aktivitas pengelolaan *input* terutama dalam bentuk sumber daya keuangan atau uang dan kas atau uang tunai, yang kemudian dikelola sebagai *input* sekunder dalam beragam faktor operasional seperti komoditas dan modal, material infrastruktur, dan tenaga kerja (Mahmudi, 2010). Idealnya, ekonomi berkaitan dengan konsep biaya untuk memperoleh suatu input atau hasil yang dirancang, di mana *input* tersebut diharapkan bisa diperoleh pada harga yang mengarah kepada harga di pasaran, dan tentu saja dengan harga yang lebih minimum (*spending less*). Efisiensi mempunyai kaitan dengan *output* berupa jasa atau barang, di mana jasa atau produk itu menggambarkan hasil dari sumber daya yang dipakai dalam mewujudkan *output* tersebut (Mahmudi, 2010). Efisiensi membandingkan output dengan input, yang juga disebut dengan berbagai nama seperti output per unit input. Suatu program kegiatan atau entitas kemungkinan besar akan mencapai tingkat efisiensi dalam pelaksanaannya jika program tersebut mencapai tingkat keluaran tertentu dengan jumlah masukan paling sedikit. Dengan kata lain, gunakan nilai input yang paling tidak memungkinkan untuk mencapai hasil yang substansial (berinvestasi dengan baik). Sedangkan efikasi terkait dengan hasil yang direalisasikan dan diproyeksikan (Mahmudi, 2010). Hasil dari tujuan program atau kegiatan terkait dengan efektivitasnya. Efektivitas selalu dikaitkan dengan nilai *outcome* yang berdampak pada pencapaian tujuan, dengan nilai output yang tinggi menghasilkan entitas atau efektivitas operasi yang lebih tinggi. Proses ekonomi berkaitan dengan nilai input dan efisiensi output, sedangkan efektivitas berkaitan dengan hasil atau dampak. Jikalau suatu kegiatan dapat efektif karena nilai *output* yang didapatkan berhasil memenuhi keinginan, hal itu digambarkan sebagai pengeluaran yang bijaksana (*spending wisely*).

Penelitian serupa mengenai *value for money* telah banyak dilakukan oleh kalangan akademisi. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditemukan dengan topik terkait yaitu *value for money* yang diteliti oleh (Hatta et al.,

2021) dengan judul “Analisis *Value for Money* pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau”. Serta menggunakan konsep *Value for Money*, penulis menginvestigasi kapabilitas keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada program-program yang dibutuhkan, khususnya Tata Kelola Pendidikan Menengah, Program Pengelolaan Pelayanan Pendidikan, dan Program Pendidikan dan Layanan Khusus. Metode yang dipakai pada studi ini ialah studi kuantitatif melalui pendekatan teknik analisis deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan datanya dalam bentuk dokumen. Pada tahun 2018 dan 2019, data tersebut dimanfaatkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja akuntabilitas instansi pemerintah serta laporan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Riau pada program pendidikan tingkat menengah tahun 2018 dan 2019 dinilai ekonomis, relatif efisien, dan kurang efektif. Akibatnya, akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak menggambarkan pengertian *value for money*. Kendala penulisan terlihat pada data keuangan yang digunakan sebagai alat analisis selama dua tahun terakhir, serta dalam melaporkan kinerja operasi hanya di satu departemen.

Adapun juga penelitian dari (Marlena et al., 2022) yang berjudul “Analisa Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektifitas Kinerja Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung”. Pendekatan studi kuantitatif deskriptif diterapkan. Metode pengumpulan data meliputi pengumpulan data, observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Realisasi anggaran dan efektivitas kinerja anggaran merupakan variabel riset. Berdasarkan temuan penelitian ini, analisis realisasi Anggaran digunakan sebagai pengukur efektivitas kinerja anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2019-2021 sangat berhasil. Karena data yang dikumpulkan oleh peneliti sudah dievaluasi dan membuahkan hasil yang positif.

Tujuan penulis dari riset ini yaitu menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2020 dan 2021 yang diukur dengan menerapkan prinsip *value for money*.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa Langkah pengukuran ini sangat diperlukan oleh berbagai instansi pemerintah,

khususnya Dinas Pendidikan dalam menjalankan kinerja operasionalnya. Mengubah model pemerintahan menuju pelayanan yang lebih efisien sudah tidak bisa ditawar lagi. Berbagai tuntutan agar pemerintah memberikan pelayanan secara cepat dan efektif semakin marak di masyarakat beberapa dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, setiap instansi pemerintah hendaknya berupaya meningkatkan kinerjanya dengan ukuran kinerja dengan pengukuran kinerja yang lebih komprehensif

Studi ini lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja pelayanan sektor publik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mengukur bagaimana kinerja pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2020 dan tahun 2021 dengan mengimplementasikan konsep *Value for Money*.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Metode penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data melalui penggunaan alat penelitian, analisis data kuantitatif/statistik, dan pengujian hipotesis (Sugiyono, 2015). Ukuran kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKjIP) periode 2020-2021 merupakan variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator pengukuran variabel ini diukur menggunakan rasio *value for money* dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomis

Rumus mengukur tingkat ekonomis sebagai berikut (Mahsun, 2020):

- <100%, maka dinyatakan ekonomis,
- =100%, maka dinyatakan ekonomi berimbang,
- >100% maka dinyatakan tidak ekonomis.

2. Rasio Efisiensi

Rumus mengukur tingkat efisiensi sebagai berikut (Mahsun, 2020):

- <100%, maka dinyatakan tidak efisien,
- =100%, maka dinyatakan efisien berimbang,
- >100% maka dinyatakan efisien.

3. Rasio Efektivitas

Rumus mengukur tingkat efektivitas sebagai berikut (Mahsun, 2020):

- <100%, maka dinyatakan tidak efektivitas,
- =100%, maka dinyatakan efektivitas berimbang,
- >100% maka dinyatakan efektivitas.

Data dalam studi ini bersumber pada data sekunder. Data sekunder ialah data yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti berdasarkan media perantara (dikumpulkan dan ditulis oleh pihak lain). Data sekunder yang digunakan dalam riset ini ialah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik periode 2020 dan 2021 yang diperoleh dari situs resminya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berasaskan penelitian kepustakaan yang meliputi penggunaan literatur terdahulu dan tinjauan Pustaka, sedangkan studi dokumentasi penelitian ini menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Metode analisis tulisan ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif (*descriptive quantitative analysis method*). Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk mengamati kondisi atau hal lainnya (keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan) yang hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2010). Studi ini berfokus pada pengamatan kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik melalui implementasi pengukuran *value for money* yakni perspektif ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Rasio Ekonomis

Total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik pada tahun 2020 yakni Rp39.473.101.559,5 dan realisasinya yaitu sebesar Rp37.060.239.752. Sedangkan pada tahun 2021 total anggaran naik menjadi Rp233.059.893.406 dan realisasinya sebesar Rp217.666.937.549. Dengan hasil prosentasi tingkat ekonomis pada periode 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yaitu 93,89% dan periode 2021 nilai persentase ekonomis sebesar 93,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik mampu menerapkan capaian anggaran sebaik mungkin. Sama halnya seperti hasil dari penelitian terdahulu oleh (Supadmini & Kristiani, 2018) bahwa kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dikategorikan ekonomis. Semakin kecil nilai persentase dari 100%, maka tingkat ekonomis dianggap sangat baik (Mahsun, 2020). Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dinilai mampu dalam hal kegiatan pengelolaan program yang direncanakan. Serta Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam melakukan kegiatannya mampu memperoleh input dengan mutu tertentu dengan harga yang rendah.

2. Analisis Rasio Efisiensi

Bisa diketahui jika pada periode 2020 dan 2021 tingkat efisiensi di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di atas 100% yang berarti sangat efisien. Di tahun 2020 dan 2021 nilai persentase mulai mengalami kenaikan dari nilai 112,3% menjadi 132,06%. Sama halnya seperti hasil dari penelitian terdahulu oleh (Sharon, 2019) bahwa Pelaksanaan anggaran Belanja BAPPEDA Tahun 2008-2012, secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Semakin besar nilai persentase lebih dari 100%, maka tingkat efisiensi sangat baik (Mahsun, 2020). Hal ini dianggap sebagai pencapaian anggaran terbaik Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

3. Analisis Rasio Efektivitas

Bersumber pada bukti yang didapatkan penulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, pada tahun 2020 dan 2021 memiliki tingkat efektivitas di bawah 100%. Pada

periode 2020, diperoleh nilai efektivitas sebesar 95,44%, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai efektivitas sebesar 90,22%. Hasil tersebut bisa diartikan jika Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam menargetkan perjanjian kinerja dikategorikan tidak efektif karena nilai persentase kurang dari 100%, yaitu persentase realisasi kinerja lebih rendah dibandingkan dengan target kinerja. Selama tahun 2020 dan 2021, persentase efektivitas semakin menurun karena Angka Partisipasi Murni (APM) serta Angka Partisipasi Kasar (APK) masih rendah (masih jauh dari target). Data

menunjukkan bahwa APK PAUD Kabupaten Gresik Tahun 2020 sebesar 75,95% dari target 89% dan APM SMP/MTS sebesar 74,77%. Namun, secara umum pada tahun 2020 APK Nasional adalah 97% (dikutip dari Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 Pasal 2 Ayat (2)). Artinya, APK/APM Kabupaten Gresik masih rendah karena masih dibawah nasional. Seperti dengan penelitian sebelumnya (Hatta et al., 2021), lima kegiatan mendapat nilai kurang dari sempurna. Menurut kriteria efektivitas, nilai yang kurang dari 100% dinilai tidak efektif.

Tabel 1:
Perkembangan Tingkat Ekonomis Selama Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kenaikan/ Penurunan
2020	Rp39.473.101.559,5	Rp37.060.239.752	93,89%	0%
2021	Rp233.059.893.406	Rp217.666.937.549	93,4%	(0,59%)

Tabel 2:
Tingkat Ekonomis dengan Kriteria

Periode	Persentase	Kriteria	Kategori
2020	93,89%	<100%	Ekonomis
2021	93,4%	<100%	Ekonomis

Tabel 3:
Perkembangan Tingkat Efisiensi Selama Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Persentase Capaian Kinerja (%)	Persentase Capaian Anggaran (%)	Persentase (%)	Kenaikan/ Penurunan
2020	92,75%	82,59%	112,3%	0%
2021	117,2%	88,75%	132,06%	(19,76%)

Tabel 4:
Tingkat Efisien dengan Kriteria

Periode	Persentase	Kriteria	Kategori
2020	112,3%	>100%	Efisien
2021	132,06%	>100%	Efisien

Tabel 5:
Perkembangan Tingkat Efektivitas Selama Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Persentase (%)	Kenaikan/ Penurunan
2020	79,46%	83,26%	95,44%	0%
2021	31,84%	35,29%	90,22%	5,22%

Tabel 6:
Tingkat Efektivitas dengan Kriteria

Periode	Persentase	Kriteria	Kategori
2020	95,44%	<100%	Tidak Efektif
2021	90,22%	<100%	Tidak Efektif

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data yang berhubungan dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- Pertumbuhan tingkat ekonomis kinerja keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sepanjang tahun 2020 dan 2021 bisa dibilang cukup ekonomis, dengan mendapatkan rasio ekonomis rata-rata di bawah 100%. Pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa tingkat ekonomis mengalami penurunan sebesar 93,89% dan 93,4%.
- Perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan kinerja keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik selama periode 2020 dan 2021 dapat dikatakan tidak efektif, dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di bawah 100% yaitu 95,44% dan 90,22%.
- Pertumbuhan tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sepanjang periode 2020 dan 2021 bisa dibilang cukup efisien, dengan memiliki rasio efisiensi rata-rata di atas 100%. Pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa tingkat efisiensi mengalami kenaikan sebesar 112,3% dan 132,06%.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dihadapi peneliti adalah kelangkaan data. Penulis menerima data yang berupa tujuan keseluruhan serta realisasi anggaran berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik selama periode 2019-2021 saja.

3. Saran

Berasaskan hasil penelitian, peneliti berikutnya diharapkan bisa membandingkan hasil kinerja keuangan kabupaten dan kota yang mempunyai kemampuan besar dalam pengelolaan keuangan daerah, agar hasil penelitian akan lebih memberikan kontribusi

yang jelas bahwa terdapat terhadap beberapa kabupaten dan kota lainnya yang mempunyai kinerja keuangan lebih bagus bila dibandingkan kabupaten dan kota lainnya. Diharapkan bagi para peneliti selanjutnya dapat menggunakan berbagai metode, bukan hanya rasio efektivitas dan efisiensi untuk mengukur kinerja belanja sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta.
- Harindra, I. (2019). *ANALISIS PENGUKURAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY*. 8, 1–15.
- Hatta, Z., Arif, E., & Garini, N. T. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 198–211.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Revisi*. https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpk_bpkpp-p-RIIMjnbS2m
- Mahsun, M. (2020). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta-BPFE.
- Marlena, Murnisari, R., & Purbaningrum, N. L. (2022). Analisa Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektifitas Kinerja Anggaran Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. *Journal of Accounting and Tax*, 01(01), 45–55.
- Purwiyanti, D. (2017). *AnaSlisis Kinerja Berbasis Konsep Value for Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. 5(3), 190–200.
- Sharon, A. (2019). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA*, 1(3), 74–81. <https://doi.org/10.37598/jam.v9i1.647>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*

Komprehensif (Cetakan Pe). Alfabeta.

Supadmini, S., & Kristiani, I. (2018). Analisis Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2016 Dengan Pendekatan Value for Money. *Jurnal Ekonomi*, 29–42.